

**RENCANA AKSI
PROGRAM *INTERNSHIP* PEMERINTAH DAERAH KE
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

I. PROGRAM

Nama Program : Program *Internship* Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan *Batch I* Tahun 2018
Tanggal Program : 16 April – 4 Mei 2018
Lokasi Program : Gdg. Radius Prawiro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jln. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

II. PESERTA PROGRAM

Nama : FAISAL, ST.
NIP : 19751014 201001 1 011
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIc
Jabatan : Kasubid Inovasi dan Teknologi
Unit Kerja : BAPPEDA
Pemerintah Daerah : KOTA PAYAKUMBUH

III. ATASAN PESERTA PROGRAM

Nama : HEDRI WALUYO, SKM.
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : KABID LITBANG dan EVALUASI
Unit Kerja : BAPPEDA

IV. MENTOR PROGRAM

Nama : JUWARTO
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Apakah Anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

No.	Nama Anggota Kelompok
1.	Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
2.	Sekretaris Bappeda
3.	Kabid Litbang dan Evaluasi
4.	Kabid. Ekonomi dan Perencanaan Makro
5.	Kabid. Sosial Budaya
6.	Kabid. Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
7.	Kasubid. Dilingkup Bappeda Kota Payakumbuh
8.	Tim IT Dinas Kominfo
9.	Tenaga IT Bappeda

1. Gambarkan suatu situasi atau isu dalam institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda yang mungkin dapat Anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi

1. Masih rendahnya usulan masyarakat yg sesuai dengan prioritas pembangunan dan memenuhi persyaratan teknis.
 - a. Contoh terkait prioritas pembangunan melalui Perwako nomor 40 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Partisipatif Pemda sudah membuat acuan Standar Pembangunan Kelurahan berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal namun masih banyak usulan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan Perwako tersebut.
 - b. Contoh terkait persyaratan teknis misalnya usulan pembangunan drainase atau jalan, ternyata status lahannya belum menjadi milik Pemda.
2. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan bottom-up. Hal ini tergambar dari tingkat kehadiran dalam Musrenbang dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan (68,83%). Diduga ini disebabkan karena masyarakat apatis usulannya akan diterima dan dianggarkan. Muncul pernyataan masyarakat "Sepuluh yang diusulkan Sebelas yang tidak diterima".
3. Proses perencanaan pembangunan belum didukung oleh ketersediaan data yang handal.

2. Apakah judul Rencana Aksi Anda?

Optimalisasi sistem e-planing melalui Inovasi Sistem Data Base Standar Pelayanan Minimal Kelurahan Model.

3. Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi Anda tersebut?

1. Meningkatnya kualitas usulan masyarakat dalam perencanaan partisipatif (Bottom Up)
2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
3. Tersedianya Data Base yang handal untuk mendukung perencanaan pembangunan.

4. Uraikan bagaimana Rencana Aksi Anda memenuhi kriteria **SMART!**

S pecific Spesifik
<i>Aktifitas spesifik apa yang akan Anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi?</i>
1. Sosialisasi Standar Pembangunan Kelurahan berbasis pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kepada Perangkat Kelurahan, Fasilitator Kelurahan, RW,RT dan masyarakat luas.
2. Membuat Dokumen kelurahan model yang memenuhi standar pembangunan kelurahan sebagaimana diatur dalam Perwako nomor 40 tahun 2017.
3. Mengusulkan penetapan pagu indikatif per Kelurahan (kepada Walikota dan DPRD) mencakup pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, minimal Rp. 300.000.000,- per Kelurahan untuk mengakomodir usulan masyarakat dalam kerangka perencanaan bottom Up.
4. Membangun sistem basis data Standar Pelayanan Minimal yang handal mulai dari tingkat kelurahan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan

Measurable Dapat diukur

Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi? Berapa orang yang terlibat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak yang diproduksi? Berapa persentase perubahan yang dicapai?

UKURAN KEBERHASILAN	JUMLAH ORANG YANG TERLIBAT	WAKTU YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH PRODUKSI	PERSENTASE PERUBAHAN YANG DICAPAI
Terlaksananya Sosialisasi melalui beberapa media dan forum sesuai waktu yang ditentukan	Internal Bappeda 40 orang, Aparat Kelurahan 5X47=235 orang, Fasilitator Kelurahan RT dan RW	Bulan Mei 2018 Sampai bulan November 2018	1. Rapat koordinasi dengan 47 Kelurahan 2. Modul Sosialisasi 3. Pemanfaatan Media/TI 4. Kuisisioner	95%
Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan yang sudah menerapkan standar Kelurahan Model	Internal Bappeda 40 orang Kelurahan 5X47=235 orang, Fasilitator Kelurahan RT dan RW	November 2018 sampai dengan Januari Tahun 2019	47 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pembangunan Kelurahan Model	95%
Disepakatinya Pagu Indikatif Kelurahan oleh Pemangku Kepentingan Rp. 300.000.000,- per Kelurahan	Kepala Daerah, DPRD, Sekda dan Asisten, Kepala Bappeda, Camat 5 orang, Lurah 47 orang	Januari s.d April 2019	Pagu Indikatif 47 Kelurahan	100%
Terbangunnya Data Base Standar Pelayanan Minimal yang handal mulai dari tingkat kelurahan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Internal Bappeda 40 orang, Camat 5 orang, Lurah 47 orang, Fasilitator Kelurahan 47 orang, RT dan RW	Bulan Mei 2018 Sampai bulan November 2019	Data Base Pemenuhan Standar Kelurahan Model Untuk 47 Kelurahan	100%
Pembangunan Sistem Informasi Data Dasar Perencanaan	Tim IT Kotadi Dinas Kominfo, + Programer Bappeda	Bulan Mei 2018 Sampai bulan November 2019		

Achievable Dapat dicapai

Apakah alasan Anda, mengapa Anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi tersebut dapat diimplementasikan?

1. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan karena didukung alokasi dana untuk rapat-rapat koordinasi
2. Pedoman mekanisme perencanaan partisipatif sudah ada
3. Selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah sehingga dengan adanya pagu indikatif kelurahan akan memperkecil ketimpangan tersebut.
4. Kebutuhan data sudah jelas dan SDM yang akan melakukan input data juga sudah ada.

Relevant Relevan

Bagaimana relevansi Rencana Aksi Anda terhadap: (a) institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda (b) tugas pokok dan wewenang Anda, dan (c) program ini?

Rencana aksi yang disusun ini menunjang pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.

Timely Rentang/ ketepatan waktu

Mengapa waktu yang Anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi?

Pelaksanaan action plan ini ditargetkan untuk penyusunan RKPD tahun 2020, sehingga masih mempunyai rentang waktu yang cukup.

5. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi

Nama Kegiatan	TAHUN 2018								TAHUN 2019					
	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1. Persetujuan Pimpinan														
2. Rapat Internal Bappeda														
3. Rapat Koordinasi Lintas PD														
4. Sosialisasi Mekanisme Perencanaan Partisipatif														
5. Pengumpulan Data Kelurahan														
6. Pembangunan Data Base Standar Pembangunan Kelurahan														
7. Pembangunan Sistem Informasi Data Dasar Perencanaan (memanfaatkan data base kelurahan)														
8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelurahan yang sudah menerapkan standar Kelurahan Model														
9. Mufakat RW														
10. Musrenbang Kelurahan														
11. Menyusun kebutuhan dan pendanaan Kelurahan untuk menetapkan pagu indikatif Kelurahan														
12. Kesepakatan pagu indikatif kelurahan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS														

6. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan sumber daya tersebut?

1. Dukungan Anggaran dengan memanfaatkan alokasi anggaran rapat-rapat koordinasi dan anggaran penyempurnaan pengintegrasian sistem e-planing
2. Dukungan SDM : sudah ada Fasilitator Kelurahan yang menjadi Admin e-planing di kelurahan dan tenaga analis serta programer serta TIM IT Dinas Kominfo.
3. Dukungan peralatan : sudah ada server e-planing, jaringan internet sudah sampai

kelurahan serta sudah tersedia komputer dan laptop tiap kelurahan.

7. *Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Anda? Bagaimana cara Anda menanggulangnya?*
1. Legislatif tidak menyepakati pagu indikatif kelurahan, dan solusinya adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Legislatif
 2. Masih kurangnya kapasitas RT dan RW sebagai ujung tombak pengumpulan data. Solusinya adalah melalui sosialisasi dan pelatihan.
8. *Bagaimana Rencana Aksi Anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), kesadaran gender (gender awareness), dan manajemen perubahan (change management)?*

Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Dengan meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisiatif, dan terbangunnya data base dan sistem informasi data dasar perencanaan akan meningkatkan good governance.

Kesadaran Gender (*gender awareness*)

Dengan terpenuhinya standar pembangunan kelurahan yang berbasis pemenuhan SPM maka dengan sendiri pembangunan akan bersifat responsif gender, baik pembangun sarana prasarana maupun pembangunan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Contohnya pembangunan sarana prasarana yang responsif gender adalah penyediaan ruangan laktasi (pojok ASI) di sarana pelayanan publik tingkat kelurahan. Contoh pada bidang ekonomi pemberdayaan ekonomi di dalamnya sudah mencakup pemberdayaan kelompok perempuan (KUBE, UPPPKS, Kelompok Dasa Wisma dll)

Managemen Perubahan (*change management*)

1. Meningkatnya partisipasi dan kualitas usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kelurahan yang sudah menerapkan standar Kelurahan Model.
3. Percepatan pembangunan di tingkat Kelurahan dan mereduksi ketimpangan wilayah.
4. Terbangunnya Sistem informasi Data Pembangunan

Jakarta, 4 Mei 2018

Peserta Program,

Mengetahui,
Atasan Langsung Peserta,

Faisal,ST

NIP. 19751014 201001 1 011

Henry Waluyo, S.K.M., M.Kes

NIP. 19750327 199903 1 005

Mentor Program,

(Juwarto)
NIP.